

# PRESS RELEASE

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



## **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2019**

**Pontianak, 13 Desember 2019** - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (BPK Kalbar) menyelenggarakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun Anggaran (TA) 2019 di Aula Kantor BPK Kalbar. Acara ini mengundang segenap pemerintah daerah di Kalimantan Barat, baik Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Inspektur, Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (BPD Kalbar), dan Direktur PDAM Tirta Khatulistiwa. Penyerahan laporan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Kalbar, **Joko Agus Setyono**.

LHP yang diserahkan merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Kalbar selama Semester II TA, yaitu lima LHP kinerja dan empat LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Sedangkan atas Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Pemantauan TLRHP, diserahkan kepada 15 entitas.

Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (aspek 3E) pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah. Dalam periode ini, pemeriksaan kinerja meliputi: bidang penyediaan air minum pada PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak; bidang pendidikan, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Sekadau; serta bidang kesehatan, yaitu pengelolaan dana dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar pada Pemerintah Kota Pontianak dan Singkawang. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa kinerja PDAM Tirta Khatulistiwa dan kinerja bidang kesehatan Pemerintah Kota Pontianak cukup efektif sedangkan kinerja bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Sekadau dan kinerja bidang kesehatan Pemerintah Kota Singkawang kurang efektif.

Pemeriksaan DTT pada periode ini meliputi pemeriksaan pengelolaan kredit segmen menengah dan korporasi serta beban operasional dan non operasional PT BPD Kalbar, dan pemeriksaan belanja daerah pada: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan Pemerintah Kabupaten Landak. Hasil dari pemeriksaan pada PT BPD Kalbar menunjukkan bahwa terdapat penyaluran fasilitas kredit yang tidak sesuai ketentuan dan tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta penetapan nilai dan realisasi remunerasi direksi dan komisaris tidak didukung keputusan RUPS dan/atau Dewan Komisaris. Sedangkan hasil pemeriksaan atas belanja daerah meliputi ketidakpatuhan terhadap peraturan atas: proses pengadaan barang/jasa, penetapan alokasi insentif, pengelolaan dana hibah bantuan sosial, dan pembayaran honorarium. Selain itu, terdapat kekurangan volume dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta belum dikenakannya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Dalam hal pemantauan TLRHP, pada Semester II TA 2019, terdapat 4.595 temuan pemeriksaan senilai Rp814,24 miliar dan dihasilkan 10.806 rekomendasi senilai Rp531,95 miliar. Atas rekomendasi tersebut, sebanyak 8.742 rekomendasi (80,90%) telah ditindaklanjuti dan telah sesuai dengan rekomendasi dan 65 rekomendasi (0,60%) tidak dapat ditindaklanjuti. Sedangkan sisanya, sebanyak 1.999 rekomendasi (18,50%) masih dalam proses tindak lanjut maupun belum ditindaklanjuti oleh entitas terkait.

Selain laporan-laporan di atas, BPK Perwakilan Kalimantan Barat juga menerbitkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah. Dari hasil pemantauan, ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan, antara lain: belum adanya skema penyelesaian kerugian daerah yang mampu memberikan informasi jumlah dan nilai kasus kerugian; belum adanya data pemantauan penyelesaian kerugian daerah; dan kurang aktifnya upaya penanganan kerugian daerah. Kurang aktifnya upaya penanganan tersebut menyebabkan penanganan menjadi tidak kunjung terselesaikan. Atas permasalahan tersebut, BPK Kalbar menyarankan agar membuat skema penyelesaian kerugian daerah, penanganan dilakukan secara lebih aktif, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian kasus, dan meningkatkan kualitas data yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi penanganan kerugian daerah.

Menjelang akhir tahun 2019, BPK Kalbar juga mengingatkan dan berharap agar pemerintah daerah dapat menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2019 secara tepat waktu, dengan penyajian sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah direviu oleh Inspektorat/Bawasda sebelum diserahkan kepada BPK.

**SUBBAGIAN HUMAS & TU KALAN**  
*BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR*